

Iklm Belajar Demokratis dalam Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di Sekolah Dasar

Jumiyati

Abstract: The purpose of this survey was to describe the democratic atmosphere of classrooms of the schools applying school-based management. Questionnaires were distributed to 116 teachers and 1511 students' of 16 primary schools. The results show that (1) the democratic climate was of moderate level, (2) more variation of democratic climate was found at the student level than at the school level, (3) factors influencing such a climate were students' gender, parent's level of education, family learning support, teacher's gender, teacher's level of education and teaching experience, and (4) schools applying school-based management outperformed compared to those not applying it.

Kata kunci: iklim belajar demokratis, pembelajaran, manajemen berbasis sekolah

Niat memperbaiki mutu pendidikan merupakan salah satu fokus penting pembangunan yang tidak luput dari masalah (Creemers, 2000; Darmaningtyas, 1999; Iskandar, 2000). Berbagai masalah yang tidak diharapkan terjadi di lingkungan sekolah. Masalah-masalah itu misalnya hubungan yang kurang harmonis (konflik) di kalangan siswa, guru, dan kepala sekolah; lingkungan fisik sekolah yang kurang bersih, kurang indah, kurang memadai; kemerosotan disiplin sekolah; pemanipulasian nilai dan pengomersialisasian jabatan oleh para personalia sekolah; manajemen tertutup dengan laporan yang "baik-baik" semata; serta hubungan antara personalia sekolah, siswa dan masyarakat

Jumiyati adalah dosen Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

yang kurang serasi. Masalah tersebut semakin diperparah oleh kondisi krisis ekonomi sosial yang sedang dialami negara ini.

Krisis ekonomi-sosial tersebut, yang dirasakan sejak 1997, memicu pemikiran penyelamatan bangsa yang direkomendasikan oleh Bank Dunia (World Bank, 1998) dalam *Education in Indonesia: From Crisis to Recovery*, dan Propenas pada 1999 (lihat Jalal & Supriadi, 2001). Ketika situasi ekonomi bangsa belum ada tanda-tanda perbaikan, muncul gagasan baru untuk menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Semuanya bermaksud menyelamatkan pendidikan dalam situasi kemelut nasional yang tidak menentu. Belajar dari pengalaman negara lain, salah satu resep yang ditawarkan sejalan dengan otonomi daerah adalah manajemen sekolah yang mandiri atau berbasis sekolah. MBS ditandai dengan otonomi sekolah dan partisipasi masyarakat yang tinggi tanpa mengabaikan kebijakan nasional. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan.

Sekolah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri: tingkat ketergantungan yang rendah, adaptif dan antisipatif/proaktif sekaligus memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil risiko, bertanggung jawab terhadap sekolah), memiliki kontrol yang kuat terhadap *input* manajemen dan sumber dayanya, memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja, komitmen yang tinggi pada dirinya, dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. (Depdiknas, 2000; Samani, 2001).

Model MBS Indonesia mengasumsikan kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah. Lima lingkup strategi yang ditawarkan adalah kurikulum yang inklusif, proses belajar mengajar yang efektif, lingkungan sekolah yang mendukung, sumber daya yang berasas pemerataan, dan standarisasi proses monitoring, evaluasi dan tes. Kelima strategi tersebut menyatu ke dalam empat lingkup fungsi pengelolaan sekolah, yaitu manajemen/organisasi/kepemimpinan, proses belajar mengajar, sumber daya manusia dan administrasi sekolah.

Keunikan MBS di Sekolah Dasar adalah memadukan aspek pembelajaran dan partisipasi semua pihak terkait baik guru maupun masyarakat. Hal ini agak berbeda dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) yang digagas oleh pihak Depdiknas untuk sekolah menengah baik SLTP maupun SMU (Umaedi, 2001). Keunikan MBS di SD yaitu apabila terlaksana dengan optimal, maka akan tercermin suasana demokratis di lingkungan sekolah itu. Sampai saat ini, belum terungkap bagaimana keadaan se-

benarnya suasana demokratis tersebut setelah lebih dari setahun diberlakukannya MBS.

Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses demokratisasi belajar, suatu proses pendemokratisasian yang mencerminkan bahwa belajar merupakan prakarsa anak. Demokratisasi belajar berisi pengakuan hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu prasyarat masyarakat belajar yang demokratis adalah ada pengemasan pembelajaran yang beragam dengan cara menghapuskan penyeragaman kurikulum, strategi pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi (Degeng, 2001). Surakhmad (2001) mengisyaratkan iklim demokratis sebagai prasyarat keberhasilan MBS, sedangkan Degeng mengungkapkan demokratisasi sebagai perwujudan implementasi MBS.

Pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi dua arah antara guru dan siswa. Guru memberikan bahan pembelajaran dengan selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif memberikan reaksi; siswa dapat bertanya maupun memberi tanggapan kritis tanpa ada perasaan takut. Bahkan, kalau perlu, siswa diperbolehkan menyanggah informasi atau pendapat guru jika memang dia mempunyai informasi atau pendapat yang berbeda. Hasil belajar pada dasarnya merupakan hasil reaksi antara bahan pelajaran, pendapat guru, dan pengalaman siswa sendiri (Sadiyo, 2003).

Mulyoto (2002) mengemukakan tiga alasan mendesak pembelajaran yang demokratis diimplementasikan di kelas. Pertama, kenyataan bahwa guru bukan lagi satu-satunya sumber belajar. Tidak dapat dipungkiri dalam era globalisasi informasi teknologi, akses terhadap informasi menjadi begitu luas: televisi, radio, buku, koran, majalah, dan internet. Saat berada di kelas, siswa telah memiliki seperangkat pengalaman, pengetahuan, dan informasi. Semua ini dapat sesuai dengan bahan pelajaran atau dapat juga bertentangan. Pembelajaran yang demokratis memungkinkan terjadinya proses dialog yang berujung pada pencapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Tanpa demokrasi di kelas, guru akan menjadi penguasa tunggal yang tidak dapat diganggu gugat. Siswa terkekang, dan akhirnya potensi kreativitasnya tidak berkembang dengan baik.

Kedua, kompleksnya kehidupan yang akan dihadapi siswa setelah lulus. Mereka memiliki kemampuan menyesuaikan diri di masa depan. Prinsip belajar yang relevan adalah belajar bagaimana belajar (*learning how to learn*). Artinya, di kelas target pembelajaran bukan sekadar penguasaan materi, melainkan siswa harus belajar juga bagaimana belajar (secara mandiri) untuk

hal-hal lain. Ini dapat terjadi apabila dalam kegiatan pembelajaran siswa telah dibiasakan untuk berpikir mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan berani bereksperimen.

Ketiga, konteks pendidikan demokrasi masyarakat. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, siswa hendaknya sejak dini telah dibiasakan bersikap demokratis, bebas berpendapat tetapi tetap dalam *rule of the game*. Ini dapat dimulai di kelas dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang menekankan adanya demokrasi. Bagaimana mereka dapat diharapkan menjadi penyokong demokratisasi kalau di sekolah mereka tidak mendapatkan pengalaman berdemokrasi?.

Ada empat pola pendapat yang menghalangi demokratisasi belajar, yakni (1) benar atau salah adalah negara saya; (2) arus pasang menggoyang semua kapal; (3) hidup adalah perjuangan; (4) keputusan berdasarkan hierarki (Degeng, 2001).

Benar atau salah adalah negara saya adalah suatu pernyataan yang meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya. Kebenaran akan dikalahkan oleh kepentingan nasional. Pernyataan ini akan mendorong orang untuk berjuang tanpa argumentasi yang memadai dan mengabaikan tumbuhnya keragaman antarpribadi di belahan bumi lain. Pernyataan ini akan mendorong orang untuk memusatkan potensi memperkuat keputusan-keputusan yang sentralistik, monolitik, dan uniformistik, dan secara sistematis menghentikan lajunya gerakan demokratisasi.

Arus pasang menggoyang semua kapal artinya sebagai bangsa secara nasional makmur, maka semua anggota masyarakat di mana pun berada, akan menikmati kemakmuran tersebut. Ini adalah suatu pernyataan yang secara potensial menutup peluang demokratisasi. Dukungan terhadap keragaman dan perlunya tindakan yang khas untuk kondisi tertentu sangat rendah.

Hidup adalah perjuangan, artinya jika ingin selamat dan sukses, maka orang harus agresif dan berusaha memenangkan segala bentuk persaingan. Hukum rimba akan tampil dalam sosoknya yang utuh bagi pendukung mitos ini, dengan mengabaikan pentingnya kontribusi kolaborasi. Kolaborasi merupakan kemampuan yang sangat penting untuk ditumbuhkan ketika memasuki era demokratisasi belajar.

Keputusan berdasarkan hierarki, artinya pimpinan adalah pembuat peraturan, pengesah peraturan, pengambil keputusan, dan pemberi perintah kepada orang lain agar tercipta keadaan yang mereka inginkan. Selain para pemimpin, orang lain harus mematuhi peraturan yang disyahkan. Mitos ini sangat nyata menghambat upaya demokratisasi belajar.

Peningkatan mutu pendidikan dasar dapat dilakukan melalui MBS sesuai tuntutan desentralisasi pendidikan. MBS yang ditandai adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang meningkat, diharapkan dapat meningkatkan kreativitas para pengelola dan pelaksana pendidikan. Keleluasaan yang lebih longgar diberikan kepada sekolah sehingga lebih kreatif dalam mengelola sumberdaya dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas baik terhadap kebutuhan peserta didik, sekolah maupun lingkungan.

Empat pilar pendidikan yang dicanangkan UNESCO yaitu *learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together* (Delors, 1997) merupakan hal yang harus menjiwai program-program kegiatan belajar mengajar di sekolah. Atas dasar prinsip-prinsip tersebut, maka pembelajaran di sekolah hendaknya mengaktifkan peserta didik tidak hanya secara fisik untuk menumbuhkan badan yang sehat, tetapi juga aktif secara mental sehingga mampu menjadi warga negara yang kritis, kreatif, dan partisipatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik sudah lama diperkenalkan, tetapi belum merata, sehingga hal ini sering menimbulkan salah pengertian dan keliru dalam penerapannya.

Gagasan pokok pembelajaran aktif yang berjiwa demokratis ialah mengerti tujuan dan fungsi belajar, mengenal anak sebagai individu, memanfaatkan organisasi kelas, mengembangkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, memberikan umpan balik yang baik, untuk meningkatkan kegiatan belajar, dan membedakan antara aktif fisik dan mental.

Berdasarkan uraian di atas, masalah penelitian ini dibatasi pada iklim demokratis di dalam kelas, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan keunggulan SD MBS dalam menciptakan iklim tersebut (bila dibandingkan dengan SD Non-MBS). Rincian pertanyaan yang diajukan dalam penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana gambaran umum iklim belajar demokratis yang dipersepsi murid SD? (2) seberapa besar variasi iklim demokratis antarsekolah? (3) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi iklim belajar demokratis berdasarkan persepsi murid di SD? (4) apakah terdapat suasana demokratis antarsekolah penerap MBS dan Non-MBS?

METODE

Penelitian ini merupakan survei dengan menggunakan rancangan hierarkis (*multilevel design*) berdasarkan asumsi dasar bahwa kondisi dan batas so-

sial, termasuk pendidikan, bersifat berjenjang-majemuk. Maksudnya, data dari siswa (sebagai level 1) dirangkaikan dalam konteks kelas (sebagai level 2), data kelas dirangkaikan ke dalam unit sekolah (level 3), dan seterusnya. Penelitian ini hanya menggunakan rancangan dua level karena setiap sekolah hanya memiliki satu kelas (dalam artian jenjang), sehingga level 2 dan level 3 menjadi datar atau setara.

Sebagai bagian dari rancangan *multilevel*, pada tahap pertama dibangun *null-model* tempat perhatian dipusatkan pada data tentang iklim belajar demokratis, tanpa melibatkan variabel eksplanatori yang independen. Dengan demikian tergambar analisis 1 *talic* (yang berlabel ganda) untuk mengetahui variasi pada setiap level sebelum melibatkan variabel independen.

Tahap kedua dari rancangan tersebut ialah memasukan sejumlah faktor yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap iklim belajar demokratis tersebut. Faktor yang diperhatikan untuk level 1 (berkaitan dengan siswa) ialah jender, usia, latar belakang status keluarga dan dukungan keluarga terhadap pembelajaran di sekolah. Faktor yang diperhatikan untuk level 2 (berkaitan dengan guru di kelas) ialah jender, usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja guru.

Tahap ketiga ialah memanfaatkan variabel signifikan pada tahap kedua sebagai pengontrol untuk mengestimasi *effect size* yang terjadi pada sekolah MBS (diciptakan variabel *dummy*: 1=MBS, 0=non-MBS). Tahap ini akan membantu peneliti agar mampu menyimpulkan apakah sekolah MBS sudah efektif atau sebaliknya dalam mengembangkan iklim demokratis di dalam lingkungannya.

Variabel-variabel penelitian ini dapat dioperasionalkan sebagai berikut: (a) Iklim belajar demokratis yaitu suasana yang menggambarkan interaksi aktif antara guru dan siswa dalam hal memberikan tanggapan kritis tanpa rasa takut, memiliki kebebasan menentukan pilihan, terciptanya suasana keteraturan dan berdiskusi dengan leluasa. Hal ini akan di ukur dengan menggunakan ISERP (*International School Effectiveness Research Project*) yang sudah divalidasi. (b) Level data: data dan variabel akan dibedakan menurut karakteristiknya antara variabel pada level siswa (level 1) dan variabel pada level kelas (sebagai level 2). Perbedaan ini penting sejak tahap pertama sampai akhir dari desain penelitian. (c) Variabel yang berkaitan dengan siswa (untuk level 1): jender, usia, latar belakang status keluarga dan dukungan keluarga terhadap pembelajaran di sekolah. Variabel jender membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Variabel usia akan dielaborasi berdasarkan tanggal lahirnya ditransformasi ke usia berbasis bulan (bukan tahun). Status

keluarga menggambarkan pendidikan dan pekerjaan orang tua (ayah dan ibu). Dibedakan jenjang pendidikan (dari SD sampai PT) dan pekerjaan (dikategorikan pekerja kasar tidak terampil, pekerja kasar terampil, pekerja profesional dan birokrat) dari kedua orang tua. Dukungan keluarga dalam artian *Family constellation for learning*, berupa membantu pekerjaan rumah, membantu pekerjaan sekolah, dan memberikan imbalan terhadap prestasi belajar siswa. (d) Variabel yang berkaitan dengan guru (level 2); jender, usia, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja. Variabel gender membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Usia guru ialah satuan tahun berdasarkan tanggal lahirnya. Latar belakang pendidikan guru membedakan antara pendidikan tertinggi dari SPG, Diploma, S1, S2, dan seterusnya. Pengalaman kerja dicerminkan dalam lamanya (berbasis tahun) bekerja sebagai guru. (e) Ciri atau status sekolah dibedakan antara sekolah MBS dan non-MBS (*dummy*: 1=MBS, 0=non-MBS).

Sumber data untuk penelitian ini ialah para siswa di SD Kecamatan Mojosari dan Puri Kabupaten Mojokerto. Sebagai sekolah eksperimen ialah gugus yang telah menerapkan MBS, sedangkan sebagai pengontrol diambil sebuah gugus di kecamatan sama yang belum melaksanakan MBS. Teknik pengambilan sampel dapat dikemukakan pada tabel 1.

Tabel 1 Jumlah Sekolah, Guru, dan Siswa Sampel

	Jumlah (n)		
	Sekolah	Guru	Siswa
MBS	8	57	891
Non-MBS	8	54	620
Total	16	111	1511

Instrumen yang digunakan untuk penelitian ini ialah skala ISERP yang memuat skala sikap akademik. Instrumen ini telah diujicobakan di beberapa negara, termasuk di Indonesia (Kaluge, 2003). Instrumen tersebut ditambah dengan beberapa variabel yang dipandang perlu untuk memecahkan masalah penelitian. Variabel tambahan yang dimaksud ialah: identitas sekolah, kondisi, dan karakteristik siswa.

Instrumen yang dipakai untuk pengumpulan data dalam bentuk angket. Angket disebarakan kepada para siswa. Salah satu bagian dari angket ini berisi pertanyaan terbuka untuk mengungkap latar belakang responden (jender, usia,

latar belakang status ekonomi social). Bagian lain dari angket ini berbentuk skala Likert (1-5) yang mengungkap sikap siswa.

Dua macam analisis data mewarnai laporan ini. Pertama, analisis statistik deskriptif (rerata, simpangan baku, dan tabulasi silang) untuk mengetahui keadaan dan sebaran data yang terkumpul. Analisis ini mengungkapkan jawaban terhadap pertanyaan penelitian pertama. Kedua, analisis multilevel (Goldstein, 1995; Kaluge, 2001) digunakan untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian (no.2 sampai dengan no. 4) yang terakhir. Untuk menjawab pertanyaan kedua data dari siswa dianalisis ke level yang lebih tinggi yaitu sekolah, agar variasi antar sekolah terungkap pada *null model*. Model penjelajahan sejumlah variabel yang secara signifikan berpeluang mempengaruhi suasana demokratis, sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan ketiga. Model ketiga, untuk menjawab pertanyaan penelitian terakhir, dirancang sebagai berikut. Dengan mengontrol temuan signifikan dari model kedua, dimasukkan *dummy variable* yang membedakan sekolah MBS dan Non-MBS. Besaran perbedaan antara kedua kategori sekolah itu menunjukkan keefektifan (dapat positif atau negatif) sekolah MBS dalam rangka mendemokratisasikan pembelajaran di sekolah.

HASIL

Gambaran Iklim Belajar Demokratis

Pertanyaan pertama berbunyi: bagaimana gambaran umum iklim belajar demokratis yang dipersepsi menurut murid SD? Jawabannya terdapat pada Tabel 2 dan 3 yang menampakkan rerata sekolah MBS cenderung lebih tinggi dari sekolah Non-MBS. Tetapi, perlu diwaspadai deviasi baku pada sekolah MBS pun lebih besar daripada sekolah Non-MBS. Tabel 3 menyingkap bahwa walau deviasi baku sedikit lebih tinggi namun kecenderungan rerata juga ikut bergeser. *Chi-square* menunjukkan perbedaan signifikan, sehingga data yang sama dapat analisis lebih lanjut seperti yang direncanakan.

Variasi Iklim Demokratis antarsekolah

Rumusan pertanyaan penelitian kedua berbunyi: seberapa besar variasi iklim demokratis antarsekolah? Hasil analisis hierarkis berjenjang yang dipampangkan pada Tabel 4 memberikan isyarat bahwa *unexplained variance* untuk level siswa sebesar 70,6% sedang pada level sekolah 29,4%. Proporsi

demikian diperoleh sebelum dimasukkannya prediktor yang kemungkinan mempengaruhi variasi tersebut.

Tabel 2 Deskripsi Skor Suasana Belajar Demokratis

	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Simpangan Baku
MBS	891	8,0	24,0	14,1	2,6
Non-MBS	620	8,0	24,0	13,3	2,1

Tabel 3. Perbandingan Pencaran Skor Suasana Demokratis

Besaran Skor	Sekolah		Total
	MBS	Non-MBS	
8,0	1	2	3
9,0	1	11	12
10,0	2	84	86
11,0	1	83	84
12,0	160	90	250
13,0	184	110	294
14,0	167	86	353
15,0	125	75	200
16,0	106	35	141
17,0	66	28	94
18,0	43	11	54
19,0	14	4	18
20,0	5	1	6
21,0	4		4
22,0	1		1
23,0	11		11
24,0	2		2
total	891	620	1511
	value	df*	sig.
Chi-Ssquare	57,971	9	0

Catatan:

Empat skor teratas dan terendah digabung karena memiliki *expected value* kurang dari 5

Tabel 4 Analisis Varian Antarjenjang Kelas dan Siswa

Parameter	Estimasi (<i>Standard Error</i>)	
<i>Fixed part</i>		
Intersep	22.29 (0.87)	
<i>Random Part</i>		
σ^2 Sekolah	22.7	(6.131)
σ^2 Siswa	54.56	(2.744)

σ^2 Total	77.26	
% σ^2 Sekolah	29.4	
% σ^2 Siswa	70.76	

Tabel 5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suasana Demokratis

Parameter	Estimasi (<i>Standard Error</i>)	
<i>Fixed part</i>		
Intersep	10.03	(3.024)
Jender siswa (0=wanita)*	-1.71	(0.46)
Usia	-0.005	(0.03)
Pendidikan ayah*	0.52	(0.14)
Pendidikan ibu*	0.14	(0.16)
Pekerjaan ayah*	0.49	(1.19)
Pekerjaan ibu*	0.31	(0.71)
Dukungan belajar*	0.47	(0.04)
Jender guru*	-0.17	(0.067)
Usia guru*	-0.056	(0.0064)
Pendidikan guru*	-0.26	(0.1)
Pengalaman mengajar*	-0.30	(0.092)
<i>Random Part</i>		
σ^2 Sekolah	14.09	(3.93)
σ^2 Siswa	41.17	(2.07)

σ^2 Total	55.26	

% σ^2 Sekolah	25.5	
% σ^2 Siswa	74.5	

Catatan: *p < 0.5

Variasi pada level siswa tetap menunjukkan jauh lebih tinggi daripada level sekolah atau kelas. Hal ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang melekat pada karakteristik siswa jauh lebih menentukan daripada guru dan kepala sekolah.

Signifikansi Sekolah MBS

Pertanyaan penelitian yang keempat ialah: “setelah mengontrol faktor-faktor berpengaruh, apakah terdapat perbedaan suasana demokratis antara sekolah yang menerapkan MBS dan Non-MBS?”. Dengan mempertahankan faktor-faktor yang signifikan (hasil analisis terdahulu), dimasukan variabel *dummy* dari sekolah MBS ke dalam model yang terpampang pada tabel 6. Ternyata ada perbedaan berarti antara sekolah MBS dan Non-MBS. Sekolah MBS lebih unggul dalam hal iklim demokratis bagi para siswa.

Tabel 6 Gambaran Suasana Demokratis pada Sekolah MBS Setelah Dikontrol

Parameter	Estimasi (Standard Error)
<i>Fixed part</i>	
Intersep	15.29(1.87)
Jender siswa (0=wanita)*	-1.72 (0.45)
Pendidikan ayah*	0.55 (0.15)
Dukungan ayah*	0.5 (0.04)
Jender guru*	0.12 (0.047)
Pendidikan guru*	-0.27 (0.035)
Pengalaman mengajar*	0.25 (0.11)
Sekolah MBS(0=Non-MBS)	0.11 (0.009)
<i>Random Part</i>	
σ^2 Sekolah	22.7 (6.131)
σ^2 Siswa	54.56 (2.744)
σ^2 Total	77.26
% σ^2 Sekolah	29.4
% σ^2 Siswa	70.6

Catatan: *p < 0.5

PEMBAHASAN

Keberhasilan MBS belum sempurna karena masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Dari ulasan terdahulu, tersirat sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi masa depan MBS, khususnya dalam nuansa suasana demokratis. Faktor pertama ialah minat kepala sekolah dan guru terhadap inovasi. Belum tampak upaya konkret dari pihak guru di sekolah untuk rela berinovasi dalam proses belajar mengajar. Mereka masih terbelenggu oleh kekang-

an dari pusat lewat panduan Kurikulum 1994 beserta suplemennya dan khawatir dipersalahkan oleh pihak birokrat atasannya. Hal tersebut oleh Darmaningtyas (1999) dijuluki sebagai warisan rezim Orde Baru dalam pendidikan. Sikap demikian menghambat inovasi apapun yang diprakarsai dari luar.

Faktor kedua, beban kerja guru di sekolah. Umumnya, selain mengajar, guru dan kepala sekolah masih dijejali oleh sejumlah tugas tambahan yang mengurus tenaga, perhatian, dan waktunya. Hal itu menyita peluang bagi guru untuk terlibat secara maksimal dalam berbagai program pembaharuan pendidikan di sekolahnya (World Bank, 1998; Jalal & Supriadi, 2001). Gejala ini diperparah oleh kondisi kesejahteraan guru sekolah dasar yang memaksa bekerja tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Faktor ketiga, ke depan, penerapan kebijakan otonomi daerah dan melelehnya posisi Departemen Pendidikan Nasional. Tampaknya kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak awal 2001 belum memberikan keleluasaan kepada sekolah. Kendali dan pengaruh pemerintah daerah terasa dominan dalam pengaturan hidup matinya sekolah. Walau Depdiknas telah memperkenalkan manajemen berbasis *sekolah* (MBS), kenyataannya ialah manajemen berbasis *daerah* (Jalal & Supriadi, 2001), sehingga himbauan Depdiknas terasa lemah dan mudah disepelekan.

Faktor keempat, ketidakjelasan MBS untuk peningkatan mutu pendidikan di masa akan datang. Gagasan MBS diakrabkan dengan peningkatan mutu mulai bergema dari pusat sampai sekolah-sekolah tanpa refleksi dan petunjuk yang jelas. Pengalaman sejumlah negara gagal membuktikan kaitan antara MBS dan mutu pendidikan. Wacana ini mengandung dua unsur yang bergerak terpisah dengan tujuan dan makna yang berbeda. MBS diawali dari sekolah, sedangkan mutu pendidikan diawali dari prestasi individu siswa. MBS memperhatikan staf sekolah dan masyarakat, sedangkan mutu pendidikan cenderung memperhatikan siswa. Pada panduan Depdiknas kelihatan bahwa mata rantai antara MBS dan mutu pendidikan belum terbentuk secara operasional, masih retorika belaka. Kondisi demikian dapat menyurutkan minat dan perhatian sekolah terhadap kebanyakan upaya inovasi.

Faktor kelima, dana dan proporsi DAU (Dana Alokasi Umum) untuk pendidikan dalam situasi kritis. Uang bukan satu-satunya masalah dalam pengembangan pendidikan, tetapi dalam situasi krisis nasional saat ini, kondisi keuangan bukanlah kondisi sepele. Di beberapa daerah, gaji guru SD nyaris tidak dapat dibayarkan karena keterbatasan dana dan rendahnya DAU. Dalam situasi tersebut tidak banyak yang dapat diharapkan dari pihak guru yang berangsur-angsur lemas dan melupakan dulu inovasi.

Program MBS ini masih tergolong relatif baru di tanah air. Pengalaman berbagai inovasi pengembangan seperti ini di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan di tahun-tahun awal belum dapat dijadikan jaminan untuk keberhasilan pada tahun-tahun berikutnya. Sudah menjadi rahasia umum, para guru dan kepala sekolah akan kembali ke kebiasaan cara kerja yang dilakukan bertahun-tahun yang mungkin dapat dirasakan *lebih pas* bagi kondisinya saat ini. Umumnya para pelaku hanya bersemangat pada awal, kemudian semakin menurun pada tahun lanjutan. Dari temuan pada bagian terdahulu tampaknya ada sejumlah aspek intervensi yang belum berjalan mulus, walau tidak terungkap dengan sempurna, dapat menjadi kendala yang mendorong guru-guru di sekolah berbalik dari program ini. Kekurangmulusan itu antara lain meliputi aspek-aspek pembelajaran dan suasana kelas serta sekolah yang seharusnya kondusif. Unsur-unsur itu patut menjadi perhatian untuk diperbaiki pada tahun berikutnya demi kesinambungan program.

Pendidikan guru termasuk faktor yang mempengaruhi iklim belajar demokratis. Semakin tinggi tingkat pendidikan guru, akan semakin tinggi pula tingkat keprofesionalan dalam mengelola pembelajaran, termasuk menciptakan iklim pembelajaran demokratis. Data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan guru semakin tidak mengesankan suasana demokratis. Hal ini menunjukkan adanya kontroversi antara keharusan dan kenyataan. Penelitian yang dilakukan memang belum mengungkap secara jelas apa yang menjadi penyebabnya. Ada beberapa dugaan, antara lain: (1) pendidikan yang ditempuh guru tidak relevan dengan tugasnya sebagai guru SD, maka walau pendidikannya tinggi wawasan tentang pengelolaan pembelajaran di SD tetap rendah. (2) guru merasa dengan pendidikan yang dimiliki tidak layak lagi mengajar di SD sehingga perhatiannya terhadap siswa kurang. (3) guru sibuk dengan pekerjaan lain yang dianggap pantas dengan pendidikannya. (4) siswa SD sendiri merasa takut karena beranggapan guru tersebut terlalu tinggi kemampuannya.

Konsep pembelajaran efektif dalam program ini pada dasarnya menyentuh salah satu elemen kunci yang mempengaruhi mutu pendidikan di sekolah. Akan tetapi kelangsungannya tidak terlepas dari perkembangan kebijakan nasional yang berkembang dari waktu ke waktu. Idealisme guru kerap pupus lantaran kebijakan dari pusat yang menggiringnya kepada dilema antara pertumbuhan profesional dan *cari makan* untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dicermati butir-butir pemikiran reformasi pendidikan untuk menangkap peluang-peluang pengembangan dalam program ini, dan kemungkinan kendala atau benturan yang dialami tahun-tahun mendatang.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa iklim demokratis pada sekolah MBS telah bersemi dan lebih berhasil di Kecamatan Puri dan Mojosari yang berlatar belakang pedesaan dan pertanian. Dapat diperkirakan bahwa sekolah di sana haus dan ingin berpartisipasi dalam inovasi pendidikan. Dari kenyataan ini dapat dipelajari bahwa mungkin bagi daerah bukan pedesaan diperlukan pemikiran yang cermat dan program yang teliti sesuai dengan kondisinya sehingga dapat berhasil-guna semaksimal mungkin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Beberapa simpulan yang dapat ditarik dari analisis dan temuan yaitu (1) iklim demokratis di dalam kelas pada umumnya sedang-sedang saja, belum optimal tetapi tidak pula rendah. Namun demikian sekolah-sekolah yang menerapkan MBS menunjukkan skor yang agak lebih tinggi daripada sekolah lainnya. Dengan mencermati sebaran (deviasi baku) skor, ada tanda-tanda pada sekolah MBS berkembang gejala baru yang lebih menyebar luas ke arah positif; (2) variasi iklim demokratis, dari segi analisis jenjang, kelihatan bahwa porsi terbesar berada pada level siswa (70,6%) lalu diikuti level sekolah/kelas (sebesar 29,4%). Oleh sebab itu faktor-faktor penjelas yang terbanyak dan terutama kemungkinan berasal dari hal-hal yang terkait erat dengan siswa; (3) dibedakan antara faktor yang berkaitan dengan level siswa dan yang berkaitan dengan level sekolah/kelas. Faktor yang berarti pada level siswa ialah jender siswa, pendidikan ayah, dukungan belajar dari pihak keluarga. Faktor signifikan pada level sekolah/kelas yaitu jender guru, pendidikan guru, dan pengalaman mengajar; (4) setelah mengontrol faktor-faktor pada level siswa dan sekolah/kelas, ditemukan bahwa sekolah penerap MBS berbeda secara signifikan dengan sekolah Non-MBS. Hal ini mencerminkan isyarat keberhasilan MBS di dalam kelas walau masih terlalu prematur untuk ditempatkan pada konteks yang lebih luas.

Saran

Sebagai upaya baru di bidang pendidikan, MBS patut dirancang dan diimplementasikan secara cermat sehingga dapat memberikan hasil positif yang diidamkan termasuk iklim demokratis di dalam kelas. Untuk itu, peranan guru, kepala sekolah dan orang tua/masyarakat dipandang penting. Siswa tidak dapat berbuat banyak tetapi ikut merasakan akibatnya.

Dalam situasi serba terbatas dan sulit, tetap diperlukan upaya dan pemikiran kreatif yang konkret setelah tujuannya dirumuskan dengan jelas dan tegas. Iklim demokratis sebaiknya disadari sebagai salah satu tujuan non-kognitif yang hendak diraih lewat MBS.

Dengan menyadari porsi *unexplained variance* yang besar pada level siswa, sudah saatnya sekolah menyadari bahwa karakteristik dan latar belakang siswa secara proporsional jauh lebih dominan daripada faktor-faktor yang melekat pada sekolah dan kelas. Oleh karena itu keberhasilan pendemokratisan suasana belajar sudah selayaknya memperhatikan faktor dominan tersebut. Prioritas pertama yang perlu diperhitungkan dan dicermati ialah faktor jender siswa, latar belakang pendidikan orang tua, dan dukungan belajar dari pihak keluarga siswa. Kemudian diikuti oleh prioritas kedua yaitu jender guru, latar belakang pendidikan guru dan pengalaman mengajarnya.

Pengalaman inovasi pendidikan di tanah air tidak selalu langgeng. Isyarat ini patut dijadikan refleksi bagi keberhasilan MBS di masa-masa penerapan awal. Akankah keberhasilan ini dipertahankan? Untuk itu diperlukan niat untuk selalu mau meningkatkan keberhasilan dan diikuti oleh kerja keras berbagai pihak terkait.

DAFTAR RUJUKAN

- Creeers, B.P.M. 2000. Report of a One-day Discussion by Indonesian dan Dutch Experts: Basic Education Indonesia. *Reflexie*, 3 (2):13-19.
- Darmaningtyas . 1999. *Pendidikan pada dan Setelah Krisis*. Yogyakarta: Kerjasama Lembaga Pengembangan Inisiatif Strategis untuk Transformasi (LPIST) dan Pustaka Pelajar.
- Degeng, I N.S. 2001. School-Based Management: Perwujudan Demokratisasi Belajar. *Jurnal Gentengkali*, 3 (9-10): 2-6.
- Delors, J. 1997. *Learning the Treasure Within. Report to UNESCO of the International Commision on Education for the Twenty-first Century*. Paris: UNESCO.
- Depdiknas. 2000. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Depdiknas.
- Goldstein, H. 1995. *Multilevel Statistical Model*. London: Edward Arnold, a division of Hodder Headline PLC.
- Iskandar, S. 2000. *Implementation Completion Report-Indonesia: Primary Education Quality Improvement Project*. Human Development Sector Unit, East Asia and Pacific Region- The World Bank.
- Jalal, F. & Supriadi, D. (Eds.). 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.

- Kaluge, L. 2001. Analisis Multilevel dalam Penelitian Pendidikan. *Forum Penelitian*, 13 (1): 1-16.
- Kaluge, L. 2003. Validasi Dimensi Sikap Akademik, Konsep Diri, Suasana Demokratis, dan Kendali Diri pada Murid SD. *Paedagogia*, 6 (2): 201-204.
- Mulyoto. 30 September, 2002. Pembelajaran yang Demokratis. *Kompas*, hlm 9.
- Sadiyo. 2003. Sumbangan Pendidikan dalam Pembangunan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 10 (1): 25-28.
- Samani, M. 2001. Manajemen Berbasis Sekolah: Manajemen Pendidikan untuk Memberdayakan Sekolah. *Media Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan*, 24 (7): 145-154.
- Surakhmad, W. 20 November, 2001. Kembalikan Pendidikan pada Masyarakat. *Kompas*, hlm. 10.
- Umaedi. 2001. *School-Based Management: a lesson learned from Indonesia*. Makalah yang disajikan pada UNESCO Sub-Regional Training Workshop: Decentralizing Basic Education for Quality Improvement-Toward School-Based Management and community Participation, Bandung 10-12 Oktober.
- World Bank. 1998. *Education in Indonesias: From Crisis to Recovery*. Washington, D.C: Education Sector Unit, East Asia and Pacific Regional Office.